

POSISI POLITIS GERAKAN PEMUDA ANSOR PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Promise Prisarisi Israfil

Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec Gubeng, Kota Surabaya 60286
promisepp05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisa posisi politis Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Penelitian ini menarik karena melihat netralitas Nahdlatul Ulama (NU) sendiri,² badan otonom milik NU sendiri seperti GP Ansor cenderung berpihak di pesta demokrasi di Indonesia. Pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, GP Ansor cenderung mendukung kubu pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri. Ketertarikan ini didasari atas perilaku pergerakan massa yang kompleks bahkan di satu tubuh gerakan pemuda semacam GP Ansor. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keberpihakan GP Ansor dalam Pilkada Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor yakni kepentingan, simbolik, dan ikatan kader. Nantinya dalam mewujudkan kepentingan organisasi apabila secara ideologis terdapat ikatan maka terjadi pola komunikasi secara langsung dalam menentukan keputusan politik.

Kata kunci: GP Ansor, pemilihan gubernur, kelompok kepentingan

ABSTRACT

This study will analyze the political position of the Ansor Youth Movement in the East Java Governor election in 2018. This research is interesting because seeing the neutrality of the Nahdlatul Ulama (NU) itself, NU's own autonomous bodies such as the Ansor GP tend to side with the democratic party in Indonesia. In the East Java Governor's election in 2018, GP Ansor tended to support Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri's stronghold. This interest is based on the behavior of complex mass movements even in one body of a youth movement such as the Ansor GP. The results of this study indicate that there is a partiality of GP Ansor in the East Java regional election due to several factors, namely interest, symbolic, and cadre ties. Later in realizing the interests of the organization if ideologically there is a bond there will be a direct communication pattern in determining political decisions.

Keywords: Ansor GP, governor election, interest group

PENDAHULUAN

Jawa Timur dapat disebut sebagai basis massa Nahdliyin Ulama (NU) terbesar di Indonesia. Di dalam sistem pemilihan elektoral, basis massa adalah faktor penting untuk mendulang kemenangan mencapai kekuasaan. Meski saat ini NU tidak lagi secara langsung mendukung salah satu calon atau partai (Haorrahman, 2018), namun NU masih memiliki peranan penting. Pada konteks realitas di masyarakat di Jawa Timur, kecenderungan dan kedekatan calon penguasa pada tokoh NU dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Di dalam tubuh NU, terdapat beberapa Badan Otonom yang berbasis pada golongan usia dan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, GP Ansor yang beranggotakan laki-laki muda NU dengan maksimal usia 40 tahun atau misalnya Muslimat NU yang secara khusus mengenai anggota perempuan NU. NU memang tidak secara gamblang menunjukkan afiliasi dan dukungan politik, namun Badan Otonom milik NU sering dikaitkan dengan salah satu calon atau partai di Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Terdapat dua pasangan calon Kepala Daerah yang menjadi kandidat pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 ini. Pasangan calon pertama adalah Khofifah Indar Parawansa–Emil Dardak dan Saifullah Yusuf–Puti Guntur Soekarnoputri sebagai pasangan calon kedua. Masing–masing pasangan calon Kepala Daerah ini harus mendapatkan dukungan minimal 20 kursi dari Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD). Khofifah–Emil yang memakai slogan KERJA di dukung enam partai politik dengan total kursi 42 kursi di DPRD, sementara Saifullah Yusuf–Puti yang memakai selogan “KABEH SEDULUR, KABEH MAKMUR” didukung oleh empat partai pendukung dengan jumlah kursi total 58 kursi di DPRD. Dapat diketahui bahwa kedua pasangan calon sudah memenuhi salah satu syarat untuk dapat maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur.

Dari segi kompetensi individu masing-masing calon memiliki latar belakang baik di ranah organisasi masyarakat maupun birokrasi pemerintahan. Jika dilihat dari latar belakang organisasi masyarakat, baik Khofifah maupun Saifullah Yusuf merupakan kader NU. Keduanya merupakan sosok penting di dalam organisasi NU. Saifullah Yusuf merupakan mantan Ketua Umum GP Ansor dan Khofifah merupakan Ketua Umum Muslimat NU dan pastinya suara dari

kader-kader NU dan sayap organisasi dari NU pun pecah. Pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dukungan kiai NU terpecah. Di pihak pengurus PWNU Jawa Timur sendiri tidak ada dukungan resmi yang merujuk kepada salah satu pasangan calon. Sejak organisasi NU berdiri, semua kiai menolak untuk terlibat dalam politik praktis karena organisasi diharapkan menjadi netral dan bisa mengawal Pilkada dengan baik. Dukungan secara pribadi dari para kiai seakan menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi politik. Hal ini ditambah juga dengan dukungan peran sayap–sayap NU (Bobby, 2018).

Saifullah Yusuf menjadi sosok penting dalam Gerakan Pemuda Ansor dan juga Saifullah Yusuf pernah menjadi bagian dari Gerakan Pemuda Ansor juga yaitu menjadi Ketua Umum, namun mengundurkan diri tapi sikap itu tidak mengubah dukungan dari kader kader Ansor maupun Barisan Serba Guna Nahdlatul Ulama (BANSER). Di Jawa Timur sendiri basis massa GP Ansor juga sangat besar, ada 4 juta Banser dan Ansor yang dikerahkan untuk menggerakkan massa untuk memeriahkan Pemilihan Gubernur di Jawa Timur (Nanang, 2018). Dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur GP Ansor bersikap netral, namun dengan melihat Ketua Umum GP Ansor yang masih mempunyai patronase politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan juga sebagai salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa maka GP Ansor sangat dekat dengan Saifullah Yusuf dan tidak menutup kemungkinan dukungan itu ada (Zaenal, 2018).

Fenomena serupa juga ditemui di Jawa Tengah pada Pemilihan Presiden 2014. GP Ansor dalam rapat yang dihadiri oleh para pengurus Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Tengah secara resmi memberikan dukungan kepada kubu pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal tersebut, menurut Jabar Al-Faruqi sebagai mantan ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Tengah, dukungan tersebut dilakukan karena mayoritas kyai dan tokoh NU mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Antara, 2014). Hal serupa di mana GP Ansor juga memberikan dukungan suaranya juga terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2014. GP Ansor DKI Jakarta memberikan suaranya kepada pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Sedikit berbeda dengan motif yang terjadi pada ajang Pemilihan Presiden, menurut Ketua GP Ansor DKI Jakarta, dukungan yang diberikan kepada Ahok-Djarot dilakukan karena menurut GP Ansor, pasangan Ahok-Djarot adalah simbol perlawanan atas fundamentalisme berbasis agama dan kelompok Islam garis keras di DKI Jakarta (<http://www.suaraislam.co/gp-ansor-dukung-ahok-ketua-gp-ansor-kami-sangat-menolak-calon->

gubernur-yang-didukung-islam-radikal diakses pada 14 Maret 2018).

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa GP Ansor selaku sayap NU, memiliki keberpihakan secara politis dalam proses Pemilihan kepala daerah dan hal tersebut juga terjadi pada Pemilihan calon Gubernur Jawa Timur 2018, dimana GP Ansor memberikan dukungan mereka kepada pasangan calon gubernur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri. Perlu dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengkaji posisi politik GP Ansor secara politik struktural dan sosial simbolik pada proses Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Sangat menarik karena sebelumnya Saifullah Yusuf pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode dan sekarang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur yang juga akan menghadapi Khofifah yang dimana Khofifah sendiri juga sudah tiga kalinya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, disisi lain juga kedua sosok calon ini merupakan kader-kader terbaik di NU.

Pilkada Jawa Timur periode 2008 - 2018

Pemilihan kepala daerah di Jawa Timur pertama kali diadakan pada tahun 2008 dan diikuti oleh 5 pasangan calon: Khofifah Indah Parawansa-Mudjiono (PPI, PPNU, PNI-Marhaen, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIB, PNBK, PKPI, PBR, PDS, PKPB, dan Partai Patriot), Sutjipto-Ridwan Hisjam (PDIP), Soenarjo-Ali Machsan Moesa (Partai Golkar), Achmady-Soehartono (PKB), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Partai Demokrat, PAN, dan PKS) (Haryadi, 2008). Pada tahun 2008, terdapat dua kali putaran pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur dimana di putaran kedua dimenangkan oleh Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan perolehan suara 7.729.944 (50,20%) mengalahkan pasangan Khofifah Indah Parawansa-Mudjiono dengan perolehan suara 7.669.721 (49,8%).

Pada Pemilihan Gubernur 2013 kedua pasangan tersebut kembali bertemu dengan diikuti oleh dua pasangan calon Gubernur lain: Soekarwo- Saifullah Yusuf (Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, PKNU, PDS, PBR dan 22 partai non parlemen), Khofifah Indah Parawansa-Herman S. Sumawiredja (PKB, PKPB, PKPI, Partai Kedaulatan, PMB, PPNU), Bambang DH-Said Abdullah (PDIP), Eggi Sudjana-M. Sihat (Calon Perseorangan). Dari hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013, ajang ini kembali memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan perolehan 8.195.816 suara (47,52%) mengalahkan pasangan Khofifah-Herman S., 6.525.015 suara (37,62%); Bambang DH-

Said Abdullah, 2.200.069 suara (12,69%); Eggi Sudjana-M. Sihat, 422.932 (2,44%) (Faizal, 2013).

Selanjutnya pada 2018, Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018 dilakukan secara bersama pada 171 daerah yang terbagi dalam 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pada Pilkada 2018, di Provinsi Jawa Timur mempertemukan Khofifah Indah Parawansa-Emil Dardak (Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, dan PAN) dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri (PKB, PDIP, PKS, Gerindra) dan memenangkan pasangan Khofifah Indah Parawansa-Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Khofifah-Emil memperoleh 10.465.218 suara (53,55%) sedangkan pasangan Saifullah-Puti memperoleh 9.076.014 suara (46,45%) (Aprialdo, 2018). Hal ini menjadi menarik karena kedua calon pasangan Gubernur memiliki latar belakang sosial yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Khofifah hingga saat ini merupakan Ketua Muslimat NU dan Saifullah Yusuf pernah menjabat sebagai Ketua GP Anzor. Kedua calon pasangan juga mendapatkan dukungan dari para kyai NU. Hal ini juga yang menarik penulis untuk menganalisa lebih dalam, apakah latar belakang tersebut menjadi pertimbangan GP Anzor sebagai badan otonom milik NU dalam menentukan sikap politiknya.

Kepentingan GP Anzor pada Pilkada Jawa Timur 2018

Menurut hasil dari wawancara yang dikumpulkan secara kualitatif deskriptif terhadap beberapa pengurus GP Anzor Jawa Timur, ditemukan bahwa pada Pilkada 2018 ini menjadi momen yang membanggakan sekaligus juga bisa membahayakan bagi organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri (berdasarkan wawancara dengan PAC GP Anzor Rungkut). Pendapat tersebut muncul dikarenakan kedua calon pasangan merupakan kader terbaik NU dan kedua calon pasangan Gubernur didukung oleh partai-partai yang mayoritas sama-sama memiliki massa besar di Jawa Timur. Dalam GP Anzor sendiri, meski organisasi NU sendiri identik dengan PKB dan PPP, setiap anggota dari GP Anzor dibebaskan untuk memilih pilihan partai politiknya masing-masing (berdasarkan wawancara dengan Gus Abid). Perbedaan partai politik yang dipilih oleh anggotanya bukanlah yang dikhawatirkan oleh NU, namun kedua calon pasangan sama-sama berasal dari NU lah yang dikhawatirkan akan menimbulkan sedikit gesekan di dalam organisasi NU itu sendiri. Gus Abid selaku Sekretaris Umum berpendapat bahwa sebaiknya suara dan calon

dari kalangan NU ini hanya satu saja untuk meminimalisir konflik internal yang dapat timbul di dalam kalangan NU (berdasarkan wawancara dengan Gus Abid). Gus Abid juga menambahkan bahwa di dalam NU sendiri sudah disepakati untuk tetap saling menjaga komunikasi antar anggota NU meski memiliki perbedaan calon pasangan. Dalam Pilkada Jawa Timur 2018 ini, yang menjadi musuh dari NU bukanlah pada perbedaan pilihan calon pasangan, namun pada tindakan-tindakan dan isu radikalisme atau SARA pada jalannya Pilkada 2018 itu sendiri.

GP Ansor, pada Pilkada Jawa Timur 2018, tidak memiliki agenda yang begitu berarti. Pertama, GP Ansor hanya berharap agar semakin banyak kader Ansor atau NU yang berada dalam pemerintahan. Menurut Gus Abid, harapan tersebut dikarenakan untuk mengurangi kepentingan-kepentingan dengan unsur radikalisme seperti kepentingan Hizbut Tahrir Indonesia yang terstruktur dan tersembunyi di dalam pemerintahan dan ingin mengubah bentuk pemerintahan Indonesia. Kedua, GP Ansor juga menginginkan perkembangan ekonomi yang merata untuk semua orang, terutama di Jawa Timur. Menurut Gus Abid, masih banyak ketimpangan ekonomi di beberapa daerah di Jawa Timur. Seperti contoh, pembangunan masih terpusat pada Surabaya dan Malang, sehingga daerah lain, seperti kota Madura masih belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah. Ketiga, GP Ansor juga berharap agar Jawa Timur bebas dari korupsi. Hal tersebut berdasarkan pada berita mengenai beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang tertangkap oleh KPK di tahun 2018, yaitu Calon Walikota Malang, Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban, dan Calon Bupati Jombang, Nyono Suharli (Antara, 2018). Keempat, GP Ansor juga berharap siapapun pemimpin yang terpilih nantinya bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan.

Di Jawa Timur, GP Ansor sangat diperhitungkan terutama dalam konteks Pilkada seperti ini. Hal tersebut dikarenakan massa kelompok GP Ansor itu sendiri di wilayah Jawa Timur sangatlah besar dan dengan sejarah keikutsertaan GP Ansor di dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Peran GP Ansor menjadi sangat diperlukan demi terciptanya perubahan secara signifikan pada pemerintahan. Beberapa kader GP Ansor juga memiliki peran penting dalam beberapa partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan masih banyak lagi. Dalam konteks Pilkada 2018 ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan dari GP Ansor itu sendiri ialah menolak organisasi radikal, pemerataan ekonomi, dan memiliki pemimpin yang bisa diterima oleh semua masyarakat. GP Ansor juga

menekankan untuk mendukung calon gubernur yang memiliki latar belakang yang sama dan dapat memperjuangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas. Dengan nilai tukar anggota GP Ansor yang tersebar di seluruh Jawa Timur, GP Ansor berharap agar kepentingan tersebut bisa diakomodir oleh Gubernur terpilih nantinya.

Posisi GP Ansor dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur

Posisi GP Ansor dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ini tidak terlepas dari keinginan internal GP Ansor maupun atas dasar ideologi GP Ansor itu sendiri. Terdapat setidaknya 3 hal yang menentukan posisi GP Ansor pada Pilkada 2018 ini yaitu kepentingan, simbolik, dan ikatan kader. Pertama, posisi GP Ansor atas dasar kepentingan bisa diartikan sebagai semakin banyaknya kader GP Ansor yang masuk dalam jajaran penting pemerintahan. Dalam hal ini, GP Ansor bisa dengan mudah untuk membentuk sebuah jejaring yang mana nantinya berfungsi untuk memudahkan kader Ansor lainnya yang ingin masuk ke dalam pemerintahan. Hal tersebut juga bisa menjadi sebuah *bargaining position* yang dimiliki GP Ansor, secara organisasi itu sendiri memiliki jumlah massa yang cukup banyak di Jawa Timur, untuk menawarkan kepentingan pragmatismenya. Menurut Gus Abid, terdapat kurang lebih sekitar 500 ribu kader GP Ansor yang tersebar di seluruh Jawa Timur (berdasarkan wawancara dengan Gus Abid). Dengan banyaknya kader GP Ansor tersebut, para kader lebih cenderung untuk mengikuti instruksi yang didominasi oleh *pare elite* yang ada dalam GP Ansor. GP Ansor pun akan menjadikan hal tersebut sebuah pertimbangan sebelum menentukan posisi dalam Pilkada 2018.

Kedua, posisi GP Ansor berdasarkan simbolik lebih cenderung mengarah kepada Saifullah Jusuf atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Gus Ipul sendiri pernah menjadi Ketua Umum GP Ansor periode 2000–2005 dan 2005–2010, yang mana bisa diartikan juga bahwa jika tergabung dalam GP Ansor, maka pada proses Pilkada 2018 ini, anggota dari GP Ansor pasti memilih Saifullah Yusuf. Namun, posisi simbolik GP Ansor yang lekat dengan Gus Ipul, secara implisit dibantah oleh Ketua PAC Ansor Rungkut, Hadi Setiawan. Hadi Setiawan berpendapat bahwa kedua calon pasangan gubernur merupakan kader-kader terbaik dari NU, sehingga tidak menjadi persoalan bagi kader-kader GP Ansor untuk menentukan pilihan pada Pilkada 2018 ini (berdasarkan wawancara dengan Hadi Setiawan Ketua PAC GP Ansor Rungkut). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tidak ada keharusan bagi anggota GP Ansor untuk memilih

Saifullah Yusuf di Pilkada 2018 ini.

Ketiga, posisi GP Ansor berdasarkan ikatan kader. Menurut hasil wawancara dengan Gus Abid, apabila salah satu calon pasangan ada ikatan kader dengan GP Ansor, secara otomatis suara mereka akan lebih memperjuangkan calon tersebut. Sebelum menentukan pilihan anggota dan Kader GP Ansor juga harus berkoordinasi dan mendengarkan arahan dari ketua umum. Gus Yaqut, selaku Ketua Umum Pusat GP Ansor, menegaskan bahwa dalam Pilkada 2018 di Jawa Timur ini harus lebih memilih mana yang merupakan kader Ansor. Dalam hal ini, Saifullah Yusuf sebagai mantan Ketua Umum GP Ansor diuntungkan dengan kondisi tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah instruksi yang berasal dari Ketua Umum GP Ansor untuk menentukan pilihan bagi kader dan anggota GP Ansor. Hanya saja, arahan tersebut tidak secara resmi diinstruksikan tertulis. Hal itu mengakibatkan kepada kebebasan para kader untuk memilih pilihannya masing-masing.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa GP Ansor lebih cenderung untuk memilih pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri karena secara kepentingan, ideologi, dan ikatan kader merujuk pada salah satu pasangan calon tersebut. Akan tetapi, instruksi yang diberikan untuk memilih salah satu pasangan calon tidak sampai pada tataran akar kader-kader GP Ansor dan tidak ada intervensi terlalu dalam pada proses pemilihan calon pasangan. Intervensi tidak dilakukan dengan alasan untuk membiasakan proses demokrasi yang sedang berjalan pada Pilkada itu sendiri. Karena bagi NU sendiri, tidak ada masalah dengan adanya perbedaan pilihan, bagi NU kedua pasangan calon merupakan kader-kader terbaik mereka.

Latar Belakang dan Posisi Dukungan GP Ansor dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018

Dukungan GP Ansor kepada salah satu pasangan calon di latar belakang oleh beberapa hal. Norman J. Ornstein dalam bukunya yang berjudul *Interest Group Lobbying and Policy Making* menjelaskan bahwa terdapat dua alasan pada pemenuhan dukungan dari beberapa kelompok berkepentingan, yaitu berdasarkan dari psikologis, simbolik dan ideologis, dan konkrit, berupa hal ekonomik, informatif, dan instrumental (Ornstein, 1978: 124). Dalam hal ini,

beberapa hal yang disampaikan oleh Onstein menjadi latar belakang bagi GP Ansor dalam menentukan posisi pada Pilkada Jawa Timur 2018. Pada latar belakang psikologis, arah dari GP Ansor dalam menentukan posisi terbagi menjadi simbolik dan ideologis.

Pertimbangan simbolik bagi GP Ansor dalam mendukung Saifullah Yusuf adalah sosok dari Gus Ipul itu sendiri. Gus Ipul seperti diketahui merupakan mantan dari Ketua Umum GP Ansor, yang mana aksi dari pencalonan Gus Ipul mampu memberikan suntikan semangat kepada kader-kader GP Ansor. Nilai tersebut yang mempengaruhi pertimbangan para elite GP Ansor dalam mendukung Saifullah Yusuf pada kontes Pemilihan Gubernur Jawa Timur di 2018 ini. Nilai simbolik ini tidak memperhatikan kepentingan atau keuntungan lebih lanjut yang bisa didapat dari pencalonan Gus Ipul. Nilai simbolik tersebut juga sama halnya dengan nilai ideologi yang berasal dari ikatan. Seperti halnya nilai yang terdapat sebagai sesama Nadhlatul Ulama maupun sesama kader GP Ansor.

Selain latar belakang psikologis, latar belakang yang bersifat konkrit dan juga instrumental juga mempengaruhi pertimbangan GP Ansor. Dalam hal instrumental, kelompok kepentingan memiliki tujuan konkrit lain yang tidak ekonomis, akan tetapi dengan fokus untuk mempertahankan eksistensi, kelompok, dan kebijakan publik. Dalam hal mempertahankan eksistensi, kelompok GP Ansor hadir dalam struktur penting di pemerintah. Kondisi tersebut mampu memberikan kesempatan GP Ansor untuk mengenalkan baik organisasi mereka sendiri maupun kader-kader terbaiknya pada publik. Hal ini memang sangat pragmatis, dimana GP Ansor akan mendapatkan keuntungan dari beberapa bentuk keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Jikapun tidak memberikan keuntungan, setidaknya tidak mengganggu kepentingan dari GP Ansor itu sendiri.

Kedua, latar belakang lainnya terdapat pada aktivitas kebijakan publik. Pada latar belakang ini, lebih cenderung kepada proses *lobbying* dari kepentingan GP Ansor. Dalam hal ini, GP Ansor memiliki kontrol terhadap pemerintah yang mana dalam bentuk promosi akan kepentingan GP Ansor itu sendiri. Apabila ada suatu kebijakan yang dirasa merugikan GP Ansor, baik dalam aspek simbolik maupun konkrit, bisa diantisipasi terlebih dahulu oleh GP Ansor secara GP Ansor memiliki akses ke pemerintahan melalui kader-kadernya. Dalam melakukan intervensi, GP Ansor dapat melakukan pola komunikasi secara langsung yaitu dalam bentuk “sistem peringatan lebih dini” kepada kader-kadernya yang ada di dalam pemerintahan.

Dengan kata lain, GP Ansor dapat melakukan evaluasi apakah keputusan yang sedang dirumuskan oleh pemerintahan sejalan atau diluar dari kepentingan GP Ansor.

Dalam posisi ini, dengan dua latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa GP Ansor lebih cenderung akan mendukung Saifullah Yusuf dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Terdapat dua keuntungan yang bisa didapatkan oleh Saifullah Yusuf ketika GP Ansor melakukan dukungan kepadanya. Pertama, GP Ansor menjadi kelompok yang memiliki kepentingan dan akan mendukung posisi dari Saifullah Yusuf. Dalam kegiatan pencalonan kepala daerah, hal ini menjadi sangat penting mengingat jika tanpa adanya legitimasi dan dukungan maka kepercayaan publik pada suatu pasangan calon akan rendah dan pemerintahan tidak stabil. Lalu yang kedua, GP Ansor sebagai kelompok kepentingan mampu membantu Saifullah Yusuf menentukan strategi politik yang akan dilakukan. Ornstein berpendapat bahwa bentuk koalisi dengan kelompok kepentingan merupakan bentuk kerja sama yang cukup efektif bagi pemilik jabatan dalam mewujudkan kepentingannya. Seperti contoh, melalui kegiatan lobi dalam kontribusi strategi dan kebijakan yang akan dibuat. Hal tersebut menjadi efektif karena adanya keterbatasan dari pemilik jabatan untuk mendalami berbagai kebijakan di beberapa bidang tertentu. Ketiga, GP Ansor mampu memberikan baik ide maupun gagasan yang solutif.

Dalam menggalakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon, GP Ansor menekankan pada garis instruksi vertikal dari pusat dan juga kewajiban moral bagi sesama kader dan anggota GP Ansor. Dengan kata lain, dalam instruksi vertikal dari pusat, Ketua Umum GP Ansor yang sedang menjabat akan memberikan arahan dukungan hingga ke tataran desa untuk memberikan dukungan kepada Saifullah Yusuf. Dalam instruksi ini, instruksi tersebut tidak lagi membicarakan Saifullah Yusuf sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama tapi lebih kepada ikatan kader yang terdapat dalam GP Ansor itu sendiri. Selain hal tersebut, pada kewajiban moral bagi sesama Ansor juga memiliki poin pertimbangan yang penting. Pertimbangan tidak bersifat instruktif dan administratif, akan tetapi lebih menitik beratkan pada nilai-nilai internal yang terkandung dalam GP Ansor. Sehingga, terdapat ikatan secara emosional antar kader Ansor untuk saling mendukung satu sama lain.

Pada kenyataannya, hal tersebut berbanding terbalik. Seperti yang diketahui bahwa GP

Ansor memiliki basis massa yang besar, terutama di Jawa Timur. Hal tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari memiliki jumlah massa yang besar ialah mampu menjadikan nama organisasi sebagai tawaran kepada aktor politik untuk memudahkan kepentingan yang dimilikinya. Di sisi lain, yang menjadi kekurangan adalah ketika elite GP Ansor tidak mampu mengakomodir mayoritas kepentingan kader dan hal itu berakibat pada terpecahnya suara massa yang dimiliki oleh GP Ansor. Hal ini lah yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dimana suara GP Ansor tidak terfokus pada Saifullah Yusuf, namun terpecah mendukung kedua pasangan calon.

SIMPULAN

GP Ansor sebagai kekuatan organisasi kepemudaan di masyarakat secara tidak langsung maupun langsung selalu terlibat pada pilkada di Indonesia. Dalam sejarah Pilkada Jawa Timur, GP Ansor selalu memperlihatkan kontribusinya. Seperti contoh pada Pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan 2013, kontribusi dari GP Ansor terlihat pada suara dukungan yang ditunjukkan kepada Saifullah Yusuf, yang mana ketika itu mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur bersama dengan Soekarwo yang menjadi calon Gubernur pada saat itu. Lalu, pada Pilkada Jawa Timur 2018, secara jelas posisi GP Ansor mendukung Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno dan suara dukungan GP Ansor pada salah satu pasangan calon juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kepentingan, simbolik, dan ikatan kader. Namun, dalam merespon posisi politis GP Ansor yang cenderung kepada Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, basis massa GP Ansor tidak memiliki satu suara. Dalam Pilkada Jawa Timur 2018, terdapat *displacement* antara elite GP Ansor dengan *grassroot*. Di sisi lain, pecahnya suara GP Ansor juga disebabkan oleh terlalu banyaknya massa yang dimiliki oleh GP Ansor sendiri. Para elite GP Ansor juga menyadari tidak perlu melakukan intervensi suara pada anggota dan kader GP Ansor sebagai bentuk pendidikan demokrasi bagi anggota-anggotanya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kader- kader dari GP Ansor banyak yang berada di tingkat desa, tipe-tipe pemilihnya bisa dikatakan rasional.

Peran organisasi masyarakat dalam Pilkada dengan memiliki beberapa faktor-faktor kepentingan, fungsi mobilistik politik, dan juga bisa menjadi kendaraan politik merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Tidak menutup kemungkinan organisasi masyarakat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dimana itu jauh dari fungsi ormas itu sendiri yang

menjadi penyambung lidah rakyat. Dibutuhkan sebuah survey kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga ormas juga dapat dipercaya dan memeberikan kontrak politik dengan pasangan yang didukung untuk merepresentasikan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ornstein, Norman. (1987). *Interest Group, Lobbying and Policy Making*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, hlm 98.
- Haorrahman. (2018). *NU Tegaskan Tetap Netral di Pilgub Jatim 2018*. Diakses pada 27 Juli 2019, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2018/02/13/nu-tegaskan-tetap-netral-di-pilgub-jatim-2018>
- Bobby. (2018). *Netralitas Kiai*. Diakses pada 27 Juli 2019, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2018/02/14/kiai-kampung-dukung-nu-netral-pada-pilgub-jatim-2018>
- Nanang. (2018). *Dukungan GP Ansor*. Diakses pada 27 Juli 2019, dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gp-ansor-jatim-kerahkan-500-ribu-kader-dalam-gerakan-rabu-putih>
- Zaenal. (2018). *Sinyal Dukungan Ketum GP Ansor*. Diakses pada 27 Juli 2019, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4079535/ketum-gp-ansor-beri-sinyal-dukungan-ke-gus-ipul-kader-pilih-kader>
- Antara. (2014). *Gerakan Pemuda Ansor Bertekad Menangkan Jokowi-JK*. Diakses pada 14 Maret 2018, dari <https://sp.beritasatu.com/Pemilu-2014/gp-ansor-bertekad-menangkan-jokowi-jk/56276>
- Red. (2017). *GP Ansor Dukung Ahok*. Diakses pada 14 Maret 2018, dari <http://www.suaraislam.com/gp-ansor-dukung-ahok-ketua-gp-ansor-kami-sangat-menolak-calon-gubernur-yang-didukung-islam-radikal/>
- Haryadi. (2008). *Partai Politik dan Cagub Jatim*. Diakses pada 24 Maret 2018, dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/11/00293939/partai.politik.dan.cagub.jatim.2008>